

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam rangka terlaksananya penelitian dengan baik maka sangat penting untuk memahami topik penelitian. Pemahaman terhadap objek penelitian ialah suatu unsur dalam pemahaman itu sendiri, atas dasar tersebut penulis dalam penelitian ini memasukan beberapa teori yang telah diungkapkan oleh para ahli terkait teori-teori menyangkut ketimpangan wilayah, PDRB per kapita, jumlah penduduk, investasi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.

2.1.1 Teori Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Karena adanya faktor anugrah awal (*endowment faktor*) perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010). Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi

berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah (Sjafrizal, 2008).

Teori Hechsher-Ohlin yang dikenal sebagai teori H-O menjelaskan pula penyebab ketimpangan antar daerah. Hechsher-Ohlin mencoba menjawab mengapa perdagangan cenderung pada suatu wilayah tertentu dan menuju pada polarisasi. Hechsher-Ohlin percaya pada *endowment factor* yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga daerah mempunyai *comparative advantage* dibanding yang lain dan ini dapat menaikkan pendapatan daerah tersebut. Inti dari model Heckscher-Ohlin adalah bahwa suatu negara cenderung untuk mengekspor barang yang menggunakan lebih banyak faktor produksi relatif melimpah di negara tersebut. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam tertentu yang jumlahnya relatif melimpah akan cenderung mengekspor sumber alam yang melimpah tersebut. Begitu pula dengan negara berpenduduk padat tetapi relatif kurang memiliki faktor produksi kapital dan cenderung mengekspor barang-barang yang padat karya. Sedangkan yang memiliki faktor produksi modal atau kapital akan relatif mengekspor barang-barang padat modal.

Teori Heckscher-Ohlin secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain jika negara tersebut memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan perbedaan kondisi ekonomi.

Karena adanya perbedaan sumber daya dan faktor produksi yang dimiliki antara negara maju dan berkembang.

Ketimpangan dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai teori pertumbuhan neo klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai hipotesa neo-klasik (Sjafrizal, 2012). Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf “U terbalik”. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umumnya di negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya di negara-negara maju.

Hipotesa neo-klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesa neo-klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap

permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya. Ketimpangan antar daerah mengalami penurunan secara signifikan pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang. (Sjafrizal, 2008).

2.1.2 Ukuran Ketimpangan Wilayah

Ukuran ketimpangan antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah Williamson indeks yang digunakan dalam studi Jeffrey G Williamson pada tahun 1966. Istilah Williamson indeks muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G Williamson yang mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai kelemahan yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berbeda dengan gini rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, Williamson indeks menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang dibandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok (Sjafrizal, 2008).

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Wilayah

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya

alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Contohnya adalah minyak dan gas alam, batubara, tingkat kesuburan lahan.

2. Perbedaan kondisi demografis

Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Contohnya adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

3. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatannya cukup besar. Kondisi inilah yang

selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Contohnya adalah terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapat lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah.

4. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transport baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto per kapita

PDRB per kapita adalah pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang.

PDRB dengan PDRB per kapita memiliki sifat yang sejalan, di mana mereka sama-sama searah dalam bidang kemakmuran masyarakat. Kedua komponen ini juga bersifat positif yang berarti semakin tinggi PDRB ataupun PDRB per kapita suatu wilayah, maka semakin sejahtera pula masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB per kapita juga diasumsikan sebagai pendapatan perkapita, sehingga setiap peningkatan perkembangan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan inflasi. (Badan Pusat Statistik, 2020).

2.1.5 Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik dalam statistik Indonesia (2013) mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada sensus penduduk tahun 2020, terdapat pembaruan konsep penduduk yaitu menjadi: penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk

menetap. Oleh karena itu jumlah penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Reverend Thomas Malthus pada tahun 1798 (arsyad, 2014) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya konsep hasil yang menurun (*concept of diminishing return*). Malthus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan per kapita akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

2.1.6 Investasi

Sadono Sukirno (2006) investasi merupakan biaya modal milik perusahaan yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian atas alat produksi beserta sejumlah barang modal sehingga dapat meningkatkan kemampuan produksi barang atau jasa dalam perekonomian. Sutha (2000) mendefinisikan investasi sebagai penempatan sejumlah dana dengan maksud mempertahankan, meningkatkan nilai, atau memberikan pengembalian yang positif. Tiap negara akan berupaya membangun

iklim yang investasi sektor publik atau swasta di dalam negeri dan sektor publik atau swasta dari luar negeri guna meningkatkan perekonomian (Dumairy, 1996).

Mankiw (2006) menegaskan bahwa investasi merupakan salah satu komponen PDB yang memperlihatkan hubungan antara masa sekarang dengan masa depan. Terdapat tiga macam pengeluaran untuk investasi:

1. *Business Fixed Investment* (investasi bisnis tetap), meliputi peralatan beserta pembelian struktur oleh perusahaan bagi proses produksi.
2. *Residential Investment* (investasi residensial), terdiri dari pembelian rumah baru yang diperuntukan bagi ruang bermukim serta yang dibeli oleh pemilik rumah untuk keperluan penyewaan.
3. *Inventory Investment* (investasi persediaan), cakupannya terdiri dari persediaan beserta bahan-bahannya, barang yang sedang diproses, serta barang jadi. Berbagai barang tersebut akan ditempatkan oleh perusahaan di gudang.

Sadono Sukirno (1994) dalam buku Pujoalwanto (2014) mengartikan penanaman modal dalam negeri merupakan kumpulan harta yang disediakan pemerintah daerah maupun pusat dengan tujuan membiayai yang masyarakat butuhkan selama proses pembangunan. Lebih lanjut, Laily dan Priyadi (2013) mengemukakan tujuan utamanya, yaitu untuk menyediakan modal bagi masyarakat dalam membangun jaringan jalan, sistem irigasi, rumah sakit, serta fasilitas infrastruktur lainnya.

Sektor swasta terlibat dalam penanaman modal asing (PMA), yang telah terbukti menghasilkan keuntungan dan didorong oleh adanya peningkatan

pendapatan. Konsumsi juga akan bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan (Laily dan Prityadi, 2013). Sebagai komponen ekonomi makro, foreign direct investment (FDI) sangat krusial untuk pertumbuhan ekonomi yang jangkanya panjang. FDI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, peningkatan FDI di negara berkembang akan mendorong realisasi proyek-proyek padat karya, yang akan mempengaruhi tingkat daya tampung keluaran yang diciptakan (Alfaro dkk, 2000).

Harapannya, kehadiran investasi baik domestik maupun asing menjadi faktor pokok pada percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Berbagai negara tersebut berkemampuan mendorong produktivitas ketenagakerjaan di masing-masing daerah melalui investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, penghasilan masyarakat akan meningkat sebagai hasil dari investasi domestik dan asing, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketika investasi terkonsentrasi di beberapa daerah saja, itu yang harus menjadi perhatian utama. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa investor lebih memilih untuk berinvestasi di daerah dengan infrastruktur yang baik. Oleh karena itu, daerah yang mendapatkan banyak dan/atau sedikit investasi akan mempunyai jumlah pendapatan masyarakat yang berbeda, yang dapat membuat distribusi pendapatan semakin tidak merata.

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan sebuah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja berkeinginan memperoleh pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2008). Pengertian tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase penduduk yang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, tidak sedang mencari pekerjaan, telah bekerja namun belum memulai pekerjaannya dari beberapa angkatan kerja yang tersedia. tingkat pengangguran terbuka dapat didefinisikan pula sebagai rasio jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja, sebagaimana ditetapkan oleh BPS dalam indikator ketenagakerjaan. Penduduk usia kerja yang usianya > 15 tahun, dimana mereka memiliki pekerjaan ataupun sedang bekerja tetapi sementara menganggur disebut angkatan kerja.

Pengangguran adalah:

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan
2. Penduduk yang tengah berusaha mendapatkan pekerjaan baru
3. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan yang beralasan telah memiliki pekerjaan, namun belum mulai bekerja.
4. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena beranggapan kemungkinannya tidak dapat memperoleh pekerjaan.

Pengangguran dilihat dari cirinya, terdapat:

1. Pengangguran Terbuka

Terjadi bila penjumlahan lapangan kerja lebih kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Alhasil, akan ada peningkatan jumlah pekerja yang menganggur dalam perekonomian.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran yang terjadi di sektor jasa maupun pertanian. Kebutuhan akan ketenagakerjaan pada tiap kondisi ekonomi bergantung pada berbagai faktor. Faktor yang patut diperhitungkan mesin yang dipakai serta pencapaian tingkat produksinya.

3. Pengangguran Musiman

Musim kemarau atau hujan menyebabkan terjadinya pengangguran ini, dimana kebanyakan terjadi di sektor perikanan maupun pertanian.

4. Setengah Menganggur

Pengangguran yang berlangsung ketika orang pindah dari daerah pedesaan ke perkotaan dengan sangat cepat sehingga akan terjadi persaingan untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan menjadi semakin sulit.

5. Pengangguran separuh waktu

Pengangguran separuh waktu berawal dari orang yang terpaksa sebagian menganggur. Selain itu, terdapat pekerja penuh waktu yang jam kerjanya jauh lebih pendek dari jam kerja normalnya.

Menurut Sukirno (dalam Pujoalwanto, 2014) pengangguran dilihat dari penyebabnya, terdapat:

1. Pengangguran Normal

Dikenal juga sebagai pengangguran friksional, mengacu pada tingkat pengangguran 2 – 3%. Tidak bekerjanya pengangguran tersebut bukan karena mereka tidak mendapat pekerjaan, namun mereka sedang proses mencari pekerjaan yang lebih layak.

2. Pengangguran Siklikal

Terjadinya pengangguran ini disebabkan ketidakstabilan perekonomian. Kadangkala *aggregate demand* lebih tinggi, dimana ini memotivasi wirausahawan untuk meningkatkan produksi sehingga proses produksinya membutuhkan banyak tenaga kerja. Namun, ada kalanya permintaan agregat turun, yang mendorong banyak perusahaan untuk memberhentikan pekerjanya, yang menyebabkan peningkatan pengangguran.

3. Pengangguran Struktural

Pengangguran ini diakibatkan oleh pergeseran struktur aktivitas ekonomi. Beberapa bisnis dan industri dalam perekonomian akan mengalami kemunduran dan tidak terus berkembang. Faktor penyebabnya antara lain pengembangan produk baru yang lebih baik, teknologi yang semakin maju, terlalu tingginya beban pengeluaran, serta penurunan ekspor barang manufaktur akibat persaingan dengan negara lain.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang disebabkan oleh pemakaian mesin serta bahan kimia untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Seperti ditemukannya inovasi di sektor industri dan pertanian.

Sjafrizal (2014) mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah cara yang baik untuk mengukur seberapa sejahtera masyarakat di daerah. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan masyarakat masih memiliki tingkat pendapatan dengan rendahnya kesejahteraan, begitu juga sebaliknya. Disebabkan Indonesia menjadi suatu negara yang jumlah penduduknya besar maka indikator ini

sangat penting karena lebih banyaknya pengadaan lapangan pekerjaan menjadi sasaran utama pembangunan yang sifatnya strategis.

Ketika seorang angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan maka ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Berdasarkan sudut pandang individu, pengangguran menyebabkan timbulnya permasalahan ekonomi maupun sosial bagi yang mengalaminya. Tidak adanya pemasukan mengakibatkan orang yang menganggur menekan biaya konsumsinya. Disamping itu, hal ini pun dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan keluarga (Sukirno, 2006).

Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angkatan kerja kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka menjadi pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka daerah itu pada akhirnya akan naik. Tingginya TPT daerah, akan terjadi ketimpangan yang lebih besar, atau ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin parah.

2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Pada dasarnya, menurut Todaro & Smith (20014) terdapat tingkatan indeks pembangunan manusia terhadap seluruh negara atau daerah dari skala terendah (nol) sampai tertinggi (satu) berdasarkan 3 (tiga) *output* akhir IPM yaitu:

1. Umur harapan hidup mencerminkan waktu hidup individu
2. Pengukuran keluhan kesanggupan membaca dan menulis orang dewasa secara tertimbang ($2/3$) dengan rerata sekolahnya ($1/3$)
3. Standar hidup yang dapat diukur dengan pendapatan riil per kapita, diselaraskan dengan ketimpangan daya beli dari setiap mata uang negara guna

menggambarkan biaya hidup serta melengkapi anggapan utilitas dari pendapatan yang kian mengalami penurunan.

United Nation Development Program (UNDP 1990) mengembangkan IPM untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Itu didasarkan pada studi global ekstensif tentang pembangunan manusia dan secara teratur muncul dalam laporan tahunan. Pada suatu proses pertumbuhan ekonomi, salah satu faktor pentingnya ialah sumber daya manusia. Perkembangan yang ada dipengaruhi oleh kinerja ekonomi lewat tingkat beserta persebaran pendapatan di dalam masyarakat. Adapun pengelolaan sumber daya pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh pembangunan SDM yang baik, baik dilihat dari kesehatan ataupun pendidikannya (Arsyad, 2010).

Menurut Wijayanto (2015), IPM atau disebut pula *Human Development Index* (HDI) adalah indikator pengukuran yang tidak hanya pada tingkat kesejahteraan penduduk secara ekonomi, tetapi juga secara sosial berdasarkan usia panjang, taraf kehidupan, dan pendidikan. Ada hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan IPM. Keterhubungan itu berdampak negatif pada ketimpangan pendapatan (Becker dalam Tirmidzi, 2012). Pengajian lebih mendalam pun dilakukan olehnya berkaitan dengan fungsi pendidikan formal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja akan meningkat sebanding dengan tingkat pendidikan formal yang diterima.

Hal ini sejalan dengan konsep *Human Capital*, dimana pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan berkurang dikarenakan peranannya dalam mengoptimalkan

produktivitas tenaga kerja. Teori tersebut memandang produktivitas seseorang menentukan pertumbuhan penduduk. Apabila setiap orang yang karena pendidikannya lebih tinggi membuatnya berpendapatan tinggi pula berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat didorong oleh pertumbuhan itu sendiri, baik secara langsung atau tidak, dimana ini akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan

2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi literatur dalam penelitian ini bagi penulis, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Regita D Zusanti, Hadi Sasana dan Rusmiati (2019) "Analisis pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi dan TPT terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa 2010-2018".	Untuk menganalisis pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa tahun 2010-2018.	Hasilnya menunjukkan variabel IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Variabel TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa.
2.	Maria Christina Yuli Pratiwi (2021) "Analisis ketimpangan	Beretujuan untuk menganalisis ketidakmerataan pembangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketimpangan antar wilayah di Kalimantan tergolong

	<p>antarwilayah dan pergeseran struktur ekonomi di Pualu Kalimantan tahun 2012-2019”.</p>	<p>antarwilayah dan pergeseran struktur ekonomi di 56 kabupaten atau kota serta membuktikan hipotesis Kuznet berlaku atau tidak di Kalimantan selama tahun 2012-2019.</p>	<p>tinggi dengan tren yang cenderung menurun. (2) Ketimpangan antarwilayah di Kalimantan lebih diakibatkan oleh ketimpangan antarprovinsi. (3) Terdapat hubungan yang kuat antara variabel PDRB perkapita dan indeks ketimpangan. Sedangkan hubungan variabel pertumbuhan ekonomi kurang kuat. (4) Hipotesa Kuznet tidak berlaku di Kalimantan. (5) Struktur perekonomian Kalimantan mengalami pergeseran dari sector pertanian ke sector industry.</p>
3.	<p>Fitrah Sari Islami (2018) “Faktor-Faktor yang mempengaruhi ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia”.</p>	<p>Tujuannya untuk mengukur ketimpangan wilayah, analisis regresi linear berganda dengan waktu penelitian tahun 2001-2015. Dengan menggunakan Eviews 9</p>	<p>Hasil penelitian bahwa (1) tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dengan nilai indeks lebih dari 1. (2) Variabel investasi, angkatan kerja dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak signifikan.</p>
4.	<p>Fatryna Yonandu Olabu (2021) “Analisis ketimpangan wilayah dan faktor-faktor yang</p>	<p>Tujuannya untuk Mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan wilayah yang terjadi antarprovinsi di Pulau Sulawesi dan menganalisis</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah yang terjadi antarprovinsi di Pulau Sulawesi sebesar</p>

	mempengaruhi ketimpangan wilayah di Pulau Sulawesi”.	pengaruh dari kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah yang terjadi di Pulau Sulawesi.	0.45, yang berarti terjadi ketimpangan sedang. Dengan variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sulawesi.
5.	Nurlaili (2016), “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017-2013”.	Menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017-2013	Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: Secara simultan, keseluruhan variabelnya mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Adapun PDRB per kapita, TPT, dan populasi penduduk secara parsial signifikan serta berpengaruh positif pada ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan yang tidak mempengaruhi ialah tingkat desentralisasi fiskalnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, kawasan barat Indonesia (KBI) dianggap sebagai kekuatan ekonomi Indonesia (Kuncoro, 2006:223). Terjadinya ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa begitu kontras dari struktur perekonomian yang masih terpusat di Pulau Jawa. Badan pusat statistik (BPS) mencatat pada tahun 2022 sumbangan pertumbuhan ekonomi menurut Provinsi di Pulau Jawa mencapai 56,48% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia.

PDRB Per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang di suatu daerah dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. Besar kecilnya nilai PDRB per kapita suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut. Selain itu, nilai PDRB per kapita suatu daerah juga dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dimana melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungan. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan. Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan jumlah pengangguran yang juga tinggi tentu ini akan berdampak pada ketimpangan antar wilayah.

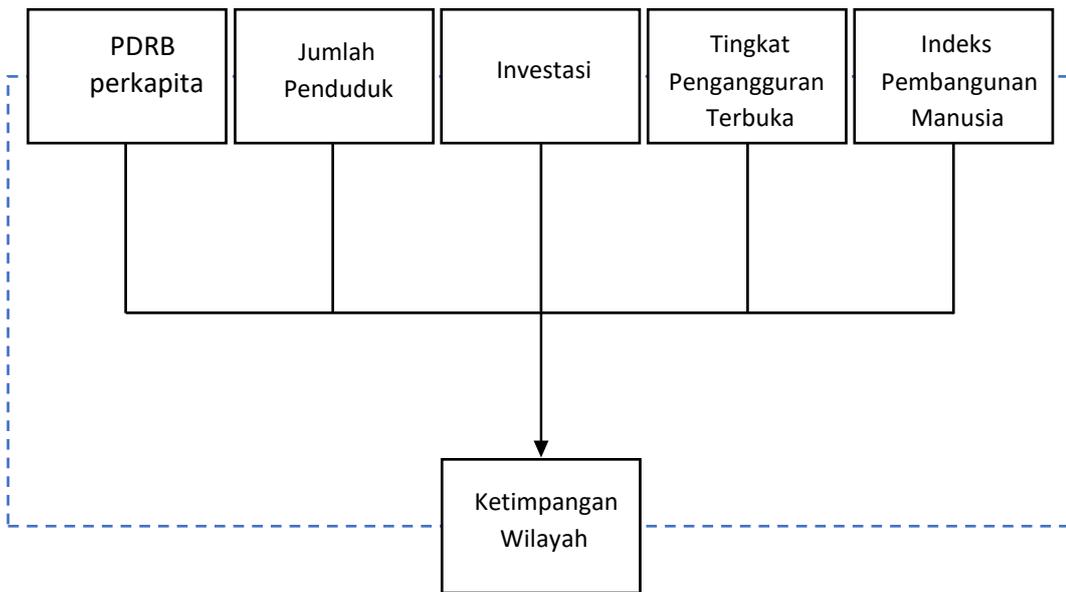
Penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan menghambat di dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyaknya tenaga kerja yang dihasilkan dan akan menjadikan perluasan pasar. Perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting yaitu pendapatan masyarakat dan juga jumlah penduduk. Jumlah penduduk disebut sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini akan mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya dan semakin memperlebar ketimpangan antar wilayah.

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena, daerah yang mendapat alokasi investasi yang lebih besar akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi yang tergambar dari kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan yang lambat dan tentunya berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran.

Melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran terbuka suatu daerah. Jika tingkat pengangguran terbuka suatu daerah tinggi nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas wilayah tersebut, sehingga akan menyebabkan produktivitas suatu wilayah tidak optimal dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal dengan wilayah lainnya. Kebalikannya, Kondisi demografis yang baik dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah cenderung akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit ketimpangan antar wilayah.

Peranan indeks pembangunan manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih tinggi dibanding yang pendidikannya rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan

hasilnya ekonomi akan bertambah lebih tinggi. Teori tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu apabila pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pembangunan dikarenakan pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis ini adalah respon sementara atau dugaan penelitian sebelum penelitian dapat dibuktikan. Adapun hipotesis penelitiannya, yaitu:

1. PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021.
2. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021.
3. Investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021.
4. TPT berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021.
5. IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021.